

**KONFLIK TANAH ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT TUNGGAL
PERKASA PLANTATIONS DI DESA AIR MOLEK, KABUPATEN
INDRAGIRI HULU, RIAU (1988-2017)**

UNIVERSITAS ANDALAS
SKRIPSI

*Diajukan Kepada Panitia Ujian Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Humaniora*

Oleh :

YORDI FILSA

1410712008

Pembimbing I : Dr. Zaiyardam, M. Hum

Pembimbing II : Dr. Lindayanti, M.Hum



**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Konflik Tanah Masyarakat dengan PT. Tunggal Perkasa Plantations di Desa Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 1988-2017”. Penelitian ini memfokuskan kepada perlawanan yang dilakukan petani terkait tanahnya yang dirampas oleh PT. Tunggal Perkasa Plantations di Desa Air Molek, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal pokok dalam pendekatan ini adalah wawancara mendalam terhadap pelaku seperti pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, masyarakat yang tanahnya dirugikan, tokoh adat, anggota DPRD dan LSM. Untuk memepertajam analisis, penelitian juga menggunakan metode penelitian sejarah. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian sejarah ini, diantaranya Heuristik (Pengumpulan data), Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi (Penulisan).

Kehidupan masyarakat yang tanahnya dirampas oleh PT TPP kian hari kian memprihatinkan. Hal itu ditandai dengan tidak mampunya masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Untuk mencukupi kebutuhan mereka tersebut pun terkadang mereka melakukan aksi pencurian buah sawit milik PT TPP. Masyarakat bukan saja hanya berdiam diri saja, sudah banyak cara yang mereka lakukan untuk mengambil kembali tanah mereka yang sudah dirampas. Upaya atau perlawanan yang dilakukan ada yang bersifat tertutup dan ada yang bersifat terbuka.

Sepanjang Orde Baru hingga Reformasi, masyarakat lebih melakukan aksi perlawanan yang bersifat tertutup. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak ingin terlacak oleh perusahaan dan pemerintah. Untuk menutupi jejak mereka tersebut, mereka melakukan aksi-aksi pencurian, mogok kerja, dan pembakaran lahan kebun. Setelah Reformasi, perlawanan yang dilakukan masyarakat cenderung bersifat terbuka. Hal tersebut ditandai dengan di tahun 1999, masyarakat mulai berani melakukan aksi demonstrasi. Hingga puncaknya di tahun 2013, saat HGU PT TPP di wilayah Kecamatan Pasir Peny telah habis masa berlakunya. Untuk menuntut hak mereka kembali, banyak upaya yang sudah dilakukan. Demonstrasi hingga bentrokan sudah dirasakan oleh masyarakat sepanjang tahun 2013 itu.

Akan tetapi, segala perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut haknya kembali sia-sia belaka. HGU PT TPP yang menjadi objek konflik diperpanjang kembali oleh BPN-RI. Bahkan untuk mempertanyakan kebenaran HGU tersebut, masyarakat membawa permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasilnya, masyarakat dikalahkan bahkan sampai tiga kali di Pengadilan. Masyarakat lagi-lagi harus menanggung beban hidup yang kian hari kian memberatkan.

Kata kunci: tanah adat, perkebunan, kelapa sawit, perlawanan, petani.